

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT KOTA SE PROVINSI
SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Akuntansi sebagai salah satu
persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



OLEH:

DOLLY RAMON

57709/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN
(Studi Pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat)

Nama : DOLLY RAMON
NIM/BP : 57709 / 2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



Deviani SE. M.Si. Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

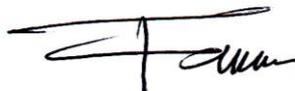
Pembimbing 2



Mayar Afriventi SE, M.Sc
NIP. 19840113 200912 2 005

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN**
(Studi empiris Pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat)

Nama : DOLLY RAMON
NIM / TM : 57709 / 2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang , April 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	 _____
2. Sekretaris	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	 _____
3. Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	 _____
4. Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dolly Ramon
NIM/Thn.Masuk : 57709/2010
Tempat/Tgl Lahir : Padang/16 April 1987
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Mangga 15 No 567 Blok F RT 05 RW 10 Perumahan
Belimbing Kuranji Padang
No. Hp/Telpon : 081374081006
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas
Keuangan (*Studi Empiris pada Pemerintah Kota se Provinsi
Sumatera Barat*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang Januari 2014



Dolly Ramon

NIM 2010/57709

ABSTRAK

DOLLY RAMON, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing 1 : Deviani, SE, M.Si, Ak

Pembimbing 2 : Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/ karyawan bagian pengawasan maka didapat responden sebanyak 64 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dengan bantuan *SPSS 15*.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,618 > 1,670$. Nilai koefisien dari variabel sistem pengendalian intern (X) adalah 0,789 ini berarti bahwa meningkatnya sistem pengendalian intern satu satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan 1,670 satuan dan bentuk pengaruh X.

Saran bagi penelitian ini adalah: 1) Sistem pengendalian masih perlu di tingkatkan agar akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat lebih baik. Hal ini bertujuan agar responden dapat menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas. 2) Untuk mengoptimalkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya pemerintah daerah dapat lebih menekankan pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah serta melakukan pengawasan fungsional yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai akuntabilitas keuangan. 4) Penelitian ini dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan akuntabilitas keuangan menjadi kuat. 5) Penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal. Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umatnya sebagai hidayah untuk dapat menjamin kehidupan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat), yang diajukan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana Ekonomi (S1) pada jurusan Akuntansi. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah turut membantu berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada peneliti yaitu yang terhormat:

1. Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dimana beliau tak pernah bosan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dimana beliau telah

berjuang terhadap mahasiswa transfer angkatan II Jurusan Akuntansi sehingga kami dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

4. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku tim penguji yang menggantikan Pembimbing I yang tidak bisa hadir pada saat ujian skripsi ini,
5. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku penguji yang telah memberikan arahan dan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, DRS, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Program Studi Akuntansi dan Tata Usaha yang telah member motivasi serta semangat pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota se Provinsi Sumatera Barat yang telah memberi izin bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Bapak Kepala Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat serta karyawan yang telah memberikan kesempatan waktu bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teristimewa untuk ayahanda Ermon Azwir, Ibunda Desmajuita (Almh) serta keluarga yang berjuang melalui do'a dan bekerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini. Semoga segala motivasi dan bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi kebaikan dan amal sholeh.
12. Teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kehadiran Allah SWT penulis memohon ampunan dari segala kekhilafan, kiranya karya ilmiah ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan terutama bagi penulis serta diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada skripsi ini masih terdapat kekurangan. Dengan harapan kepada segenap pembaca agar dapat memberikan saran dan kritikan yang dapat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padang, April 2014

Penulis

DOLLY RAMON

57709/2010

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	10
1. Sistem Pengendalian Intern.....	10
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	10
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	13
c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern.....	14
2. Akuntabilitas Keuangan.....	20
a. Konsep Akuntabilitas	20
b. Dimensi Akuntabilitas.....	24
c. Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	27
d. Kendala Akuntabilitas.....	28
e. Dimensi Pengukuran Akuntabilitas Keuangan.....	30
B. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis.....	31
C. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Variabel Penelitian	40
1. Variabel Dependen	41
2. Variabel Independen	41
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	44
1. Uji Validitas.....	44
2. Uji Reliabilitas	45
G. Uji Asumsi Klasik	45
1. Uji Normalitas	45
2. Uji Heterokedostisitas.....	46
H. Teknik Analisis Data.....	46
1. Analisis Deskriptif	46
2. Metode Analisis Data	48
3. Uji Hipotesis	49
4. Definisi Operasional	50

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Analisis Deskriptif	52
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	53
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	54
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	55
C. Deskripsi Hasil Penelitian	55
1. Sistem Pengendalian Intern	56
2. Akuntabilitas Keuangan	57
D. Statistik Deskriptif	58
E. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
1. Uji Validitas.....	59

2. Uji Reliabilitas	61
F. Uji Asumsi Klasik	62
1. Uji Normalitas	62
2. Uji Heteroskedastisitas	63
G. Hasil Penelitian	64
1. Analisis Regresi	64
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
3. Uji Hipotesis (t-test)	66
H. Pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Keterbatasan Penelitian	70
C. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL	Halaman
TABEL 1 Populasi Penelitian	40
TABEL 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	42
TABEL 3 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	52
TABEL 4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
TABEL 5 Responden Berdasarkan Usia.....	53
TABEL 6 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	54
TABEL 7 Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	55
TABEL 8 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern	56
TABEL 9 Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Keuangan.....	57
TABEL 10 Deskriptif Statistik.....	59
TABEL 11 Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil	60
TABEL 12 Hasil Pengujian Validitas	60
TABEL 13 Nilai Cronbach's Alpha.....	61
TABEL 14 Uji Normalitas	62
TABEL 15 Koefisien Regresi Sederhana	64
TABEL 16 Uji Koefisien Determinasi.....	65

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	Halaman
GAMBAR 1 Kerangka Konseptual	37
GAMBAR 2 Scatterplot.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen keuangan daerah pada awalnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam manajemen keuangan daerah pelaksanaan otonomi daerah direalisasikan oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan dua peraturan yaitu pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dengan hubungan keuangan, sekaligus munculnya perubahan penting dalam reformasi keuangan daerah.

Banyak sekali aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian utama adalah adanya paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah. Menurut Abdul (2004:16) paradigma tersebut adalah sebuah paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Penyempurnaan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 telah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada

masyarakat melalui DPRD). Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih *akuntabel* dan transparan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan satu pekerjaan yang kompleks dan berkesinambungan. Pada tahap awal desentralisasi dilakukan transfer berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat ke berbagai institusi terutama institusi pemerintah subnasional. Setelah transfer kewenangan kemudian diikuti dengan transfer pembiayaan, dokumen-dokumen serta sarana dan prasarana. Setelah tahap-tahap tersebut selesai dilalui, maka muncul serangkaian tantangan baru berkaitan dengan kemampuan dari institusi yang memperoleh transfer kewenangan untuk mengalokasikan secara baik dan benar.

Dampak positif dari implementasi undang-undang tentang otonomi daerah tersebut berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota dewan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya ke dalam berbagai bentuk kebijakan publik. Dampak lain yang muncul dari implementasi tersebut adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi (Basri, 2008:29).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-

lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Saat ini, belum sepenuhnya aparatur pemda menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, telah diubah kembali dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 yang mengatur bagaimana wewenang, hak dan kewajiban daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern” dan penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan sehingga pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengawasan oleh Badan Pengawas provinsi/kabupaten/kota belum optimal dan sering dijumpai temuan-temuan BPK yang berulang dan lambat ditindaklanjuti (BPK, 2009).

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pengelolaan sumber daya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD.

Masalahnya adalah apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Akuntabilitas keuangan yang berkualitas memuat informasi yang akurat/handal dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan (Mohamad, 2004:278).

Untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan, hal ini diperlukan agar akuntabilitas keuangan berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No 20 Tahun 2001).

Halim (2004:258) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. *Public Accountability* hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari

DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang professional, independen dan obyektif (Halim, 2002:28).

Jadi dengan adanya pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan intern oleh inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas

Selain melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2008, Inspektorat juga berperan dalam meningkatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern yaitu dengan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik, pertanggungjawaban dapat terwujud. Salah satu indikator dari sistem pengendalian intern adalah adanya pemeriksaan yang independen terhadap pelaksanaan. Jika pemeriksaan ini dilaksanakan secara baik maka akan timbul kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang merupakan indikator dari akuntabilitas publik.

Pengawasan Intern di kabupaten/kota dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Peran Inspektorat daerah berpengaruh terhadap terwujudnya akuntabilitas publik. Artinya jika Inspektorat daerah menjalankan fungsi sebagai pengawas

penyelenggaraan pemerintahan dengan baik tentunya akan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan. Sehingga dengan adanya pengawasan intern dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1993:165). Sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih *akuntabel* dan transparan. Hal ini akan tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang handal, dan mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Surya (2004) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas.

Dengan masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas tentunya dapat membuka lebar peluang terjadinya manipulasi data yang berujung pada kecurangan. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di sektor publik.
2. Bagi akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan akademika.
3. Bagi sektor publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan akuntabilitas terhadap informasi laporan keuangan